bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa karena elemen unsur kedua ini bersifat alternatif, maka akan dibuktikan salah satu elemen saja yang apabila terbukti, maka elemen yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah mengajak dan membawa saksi NURUL NURHANIFAH (korban) yang katanya untuk bekerja sebagai Baby Sitter (pengasuh bayi) di Jember dan atas permintaan terdakwa, saksi NURUL NURHANIFAH juga mengajak temannya bernama SITI HOTIJAH (korban).

Menimbang, bahwa dari para korban tersebut terdakwa memperoleh imbalan jasa dari setiap laki-laki yang dilayani sedangkan Sutiah menerima setoran sewa kamarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, elemen perekrutan, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia telah terbukti, dengan demikian unsur kedua ini terpenuhi;
Ad. 3. Sebagai orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa terdakwa bersama-sama dengan Supardi dan Sutiah telah merencanakan terhadap para saksi korban (NURUL NURHANIFAH dan SITI

HOTIJAH) untuk diperkerjakan sebagai PSK di Lokalisasi LCM Ketapang Kabupaten Banyuwangi dimana terdakwa dan Supardi serta Sutiah memperoleh keuntungan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam pasal 183 KUHP dimana antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa turut serta melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Sifat dari perbuatan tindak pidana itu sendiri, yang saat ini dipandang sebagai perbuatan tercela dan meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menghancurkan masa depan para saksi korban ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah menjalani penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis sependapat dengan permintaan Penuntut Umum dalam suratuntutannya.